

**ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANGKA KEMATIAN IBU STUDI  
KASUS KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG**

Beny Setiawan, Herbasuki Nurcahyanto

**Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : [http: www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Angka Kematian Ibu menjadi indikator keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan. Tahun 2017 Kecamatan Pedurungan memiliki kasus kematian ibu tertinggi di Kota Semarang yakni enam kasus dan empat kasus pada tahun 2018. Melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang keselamatan ibu dan anak, Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk menekan angka kematian ibu yang melibatkan berbagai *stakeholders*. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis peran *stakeholders* dalam implementasi kebijakan penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan *stakeholder* Kunci adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang mempunyai peran sebagai *policy creator*, fasilitator, akselerator, dan koordinator. *Stakeholders* primer adalah Tenaga Kesehatan (Bidan) memiliki peran sebagai fasilitator, implementer, dan koordinator, IBI Kota Semarang, PKK Kecamatan Pedurungan dan FKK berperan sebagai fasilitator, implementator dan koordinator. *Stakeholders* Skunder terdiri dari Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, keluarga, Institusi pendidikan dan Dunia Usaha yang masing-masing berperan sebagai fasilitator. Rekomendasi yang dapat diberikan yakni Dinas Kesehatan dapat menjadi pemimpin utama dan memastikan optimalnya peran untuk mensinergiskan seluruh *stakeholders*. Koordinasi dan komunikasi harus selalu diupayakan dan pelibatan *stakeholders* terutama petugas lapangan dalam setiap proses kegiatan termasuk penumbuhan komitmen disetiap pertemuan rutin. Kerjasama dengan pihak swasta atau organisasi peduli kesehatan juga perlu dilakukan untuk membantu mempercepat penanggulangan angka kematian ibu di sektor bantuan pendanaan atau tenaga.

Kata Kunci : *Stakeholders*, Peran, Penanggulangan AKI

## **ABSTRACT**

*Maternal Mortality Rate is an indicator of the success of development in the health sector. In 2017 and 2018 Pedurungan District had the highest maternal mortality cases in Semarang City, which were six cases and four cases. Semarang City Regional Regulation No. 2 of 2015 concerning maternal and child safety, Semarang City Government seeks to reduce the maternal mortality rate involving various stakeholders. This study aims to identify and analyze the role of stakeholders in the implementation of policies on overcoming maternal mortality in the District of Pedurungan, Semarang City. The research method uses descriptive qualitative research methods. The results of the study show that the Key stakeholders of the Semarang City Health Office play the role of policy creators, facilitators, accelerators, and coordinators. Primary stakeholders are Health Workers (Midwives) acting as facilitators, implementers, and coordinators, IBI Semarang City, PKK Pedurungan District and FKK play roles as facilitators, implementers and coordinators. Secondary stakeholders consisting of sub-districts, villages, RT, RW, families, educational institutions and the business community act as facilitators. The recommendation given is that the Health Office can be the main leader and ensure the optimal role to synergize all stakeholders. Coordination and communication must always be pursued and the involvement of stakeholders, especially field officers, in every process of activity including the growth of commitments at every routine meeting. Collaboration with private parties or health care organizations also needs to be done to help accelerate the reduction of maternal mortality rates in the financial aid sector or personnel.*

*Keywords: Stakeholders, Role, prevention of maternal mortality*



Tingginya Kasus Kematian ibu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang perlu mendapatkan perhatian oleh berbagai *stakeholders* yang terlibat mengingat Kota Semarang sebagai Ibukota provinsi Jawa Tengah yang menjadi sorotan utama. Tingginya angka kematian ibu jika tidak diatasi dengan penanganan yang optimal menjadi keresahan tersendiri terutama bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang menjelaskan bahwa 95 persen kematian ibu di rumah sakit. Mayoritas meninggal setelah persalinan atau masa nifas. Ada beberapa simpul kematian ibu yakni di masyarakat yang tidak peduli, bidan praktik mandiri, Puskesmas dan rumah sakit yang belum lengkap prasarannya. 600 bidan di Kota Semarang, 10 di antaranya mendapat teguran, teguran juga diberikan pada puskesmas dan rumah sakit yang lalai. (Iswidodo. Tribun Jateng. 2016)

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Ibu dan Anak menyebutkan pada Pasal 38 bahwa koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan upaya keselamatan ibu dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan Perangkat Daerah terkait, swasta dan masyarakat. Banyaknya *stakeholders* yang terlibat dalam masalah kematian ibu

menunjukkan bahwa angka kematian ibu merupakan permasalahan serius yang harus diatasi dengan cepat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Siapa *Stakeholders* yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?
2. Bagaimana peran *Stakeholders* dalam Implementasi Kebijakan penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi *stakeholders* dan perannya dalam implementasi kebijakan penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

## **D. KAJIAN TEORI**

### **1. Administrasi Publik**

Nicholas Henry dalam Pasolong (2012:56) administrasi publik adalah suatu kombinasi kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga

mendorong kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. keputusan dalam kebijakan publik.

Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro dalam Pasolong (2012:56) menjelaskan Administrasi Publik yakni:

- a. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan
- b. Meliputi eksekutif, legislatif dan serta hubungan diantara mereka
- c. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik
- d. Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat
- e. Beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

## **2. Kebijakan Publik**

Menurut Anderson dalam Agustino (2016: 17) Kebijakan Publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Anderson dalam Agustino (2016: 17) Kebijakan Publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn dalam (Winarno, 2012: 35-37) yaitu Tahap Penyusunan Agenda, Tahap Formulasi Kebijakan, Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan.

## **3. Implementasi Kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014: 232) Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Barret dalam Agustino (2016: 128) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan kedalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri.

## **4. Penanggulangan Angka Kematian Ibu**

kamus besar bahasa indonesia (2012: 529) Penanggulangan berasal dari kata “Tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi, kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, menjadi “Penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

Definisi Kematian Ibu menurut WHO (*World Health Organisation*) adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera.

### 5. Analisis Peran Stakeholders

Menurut David Viney dalam Yuniningsih (2019: 98) *stakeholders* adalah setiap orang yang terpengaruh oleh keputusan dan tertarik pada hasil dari keputusan tersebut, termasuk individu-individu, atau kelompok-kelompok atau keduanya baik didalam maupun diluar organisasi. Stakeholders mutlak diperlukan dalam organisasi publik guna memperlancar semua kegiatan.

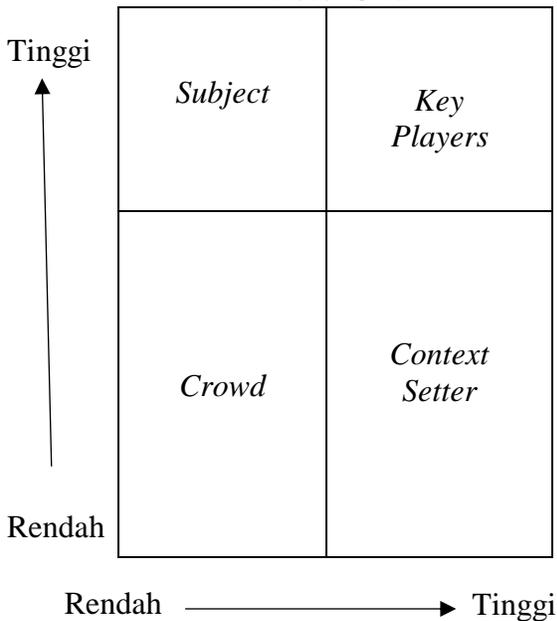
Menurut Anderson dalam Kusumanegara (2010: 53) studi Proses kebijakan, aktor-aktor kebijakan berasal dari berbagai macam lembaga yang tercakup dalam supra struktur politik maupun infra struktur. Para ahli mengidentifikasi aktor dalam kebijakan yaitu: Legislatif, eksekutif, yudikatif, kelompok penekan, partai politik, media massa, organisasi komunitas, birokrasi, NGO, swasta dan kelompok *think thank*. Para aktor atau *stakeholders* tersebut memiliki karakteristik yang menunjukkan kekuatannya dalam mempengaruhi proses kebijakan.

Maryono *et al.* dalam Latupapua (2015: 25) menjelaskan klasifikasi *stakeholders* dapat dikelompokkan menjadi:

- a. *Stakeholders* primer merupakan *stakeholder* yang secara langsung terkena dampak, baik positif maupun negatif dari suatu rencana serta mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan tersebut.
- b. *Stakeholders* kunci merupakan *stakeholder* yang secara legalitas memiliki kewenangan, pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan pada pembuatan kebijakan.
- c. *Stakeholders* Sekunder adalah *stakeholder* yang tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan tetapi memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan. Stakeholders pendukung dapat dijadikan fasilitator dalam proses pengembangan dan cukup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Teknik pemetaan *stakeholders* yang dikemukakan Aden dan Ackermann dalam Bryson (2004 :15) yakni teknik pemetaan *power Versus Interest Grid*. Teknik analisis ini fokus utamanya adalah *power* dan *interest*.

Gambar 1.2  
Kuadran Analisis Power Versus  
Interesst Grid



Sumber : Bryson (2004)

Keterangan :

- a. *Subjects* merupakan *stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah.
- b. *Key players* merupakan *stakeholders* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
- c. *Context setter*, merupakan *stakeholders* yang memiliki pengaruh yang tinggi tapi sedikit kepentingan..
- d. *Crowd* merupakan *stakeholders* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan.

Mengetahui peran dari masing-masing *stakeholders* dalam implementasi kebijakan

maka Nugroho (2014, 16-17) mengklasifikasikan peran *stakeholders*, antara lain:

- a. *Policy creator*, *stakeholders* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b. Koordinator, *stakeholders* yang berperan Dalam mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat dalam kebijakan.
- c. Fasilitator, *stakeholders* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
- d. Implementer, *takeholders* yang pelaksana kebijakan dimana didalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. Akselerator, *stakeholders* yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat daripada waktu pencapaiannya.

## 6. Jaringan aktor (*Stakeholders*) Actor Network Theory (ANT)

Jaringan aktor adalah jaringan heterogen penyalarsan kepentingan, termasuk manusia, organisasi dan standar (Walsham dan Sahaya dalam (Yuniningsih, 2019: 81)). Hubungan karena kesamaan kepentingan, penggabungan kekuatan, penyerahan sumberdaya aktor yang satu kepada aktor yang lain dalam rangka pencapaian kepentingan bersama atau menitipkan

kepentingannya agar tercapai melalui aktor utama adalah salah satu bentuk jaringan heterogen yang terjadi antar manusia.

## **E. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang penulis gunakan yakni Penelitian deskriptif Kualitatif. Situs Penelitian berada di wilayah Kecamatan Pedurungan dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Informan pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan dilanjutkan dengan *teknik snowball sampling*. Data primer dan data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan metode dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menguji kualitas data yakni menggunakan teknik triangulasi.

Adapun dalam menganalisa data sesuai dengan pendapat Seiddel dalam (Moloeng, 2009:248) yaitu:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri
- b. Mengumpulkan, memilah, serta mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-

hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Identifikasi *Stakeholders* dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan AKI di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang**

*stakeholders* yang terlibat dalam Penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terdiri dari:

#### **1. *Stekholders* Primer**

Tenaga Kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia Kota Semarang, PKK Kota Semarang dan FKK karena memiliki dampak langsung terhadap kebijakan pemerintah Kota Semarang. Peran dari Tenaga Kesehatan, IBI kota Semarang, PKK Kota Semarang dan FKK dimulai dari tahap pencegahan kematian ibu sampai dengan penanggulangan kematian ibu begitu tergantung dari kebijakan pemerintah dan berdampak terhadap kinerja *stakeholders*. Dampak yang dipengaruhi antara lain Sumber daya manusia yang ada dalam penanggulangan kematian ibu yang dimiliki oleh lembaga atau *stakeholders*, anggaran atau pendanaan bagi lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi angka kematian ibu. Kegiatan yang dilakukan

oleh Tenaga Kesehatan, IBI kota Semarang, PKK Kota Semarang dan FKK tentu berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang keselamatan ibu dan anak.

## **2. Stakeholders Kunci**

*stakeholder* kunci dalam penanggulangan angka kematian ibu adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang karena memiliki wewenang dalam merumuskan kebijakan mengenai penanggulangan kematian ibu, wewenang tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.

## **3. Stakeholders Sekunder**

Kecamatan, Kelurahan, Keluarga, RT, RW, Dunia Usaha, dan Institusi Pendidikan merupakan *stakeholders* skunder dalam implementasi kebijakan penanggulangan AKI di Kecamatan Pedurungan, *stakeholders* tersebut tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap penanggulangan kematian ibu namun memiliki kepedulian dan peran sebagai pendukung program penanggulangan kematian ibu. upaya kepedulian yang dilakukan adalah dengan ikutserta memberikan informasi terkait

kesehatan ibu, memberikan fasilitas dan akses tertentu bagi ibu sesuai dengan fungsi masing-masing *stakeholders*.

*Stakeholders* yang terlibat mempunyai kepentingan dan kekuasaan yang berbeda-beda. Kepentingan dan kekuasaan oleh *stakeholders* akan mempengaruhi pencapaian *output* kebijakan. Sesuai dengan yang dikemukakan Bryson (2004) mengelompokkan *stakeholders* menjadi 4 yakni *Key Player*, *Subject*, *Crowd* dan *Context Setter*.

### *a. Key Players*

*Key Players* sebagai *stakeholder* yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar. Dinas Kesehatan memiliki Power yang besar dalam keterlibatan penyusunan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang keselamatan ibu dan anak. Wewenang yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan didukung oleh sumber daya yang dimiliki seperti anggaran yang besar dari Dinas Kesehatan untuk penanggulangan angka kematian ibu. Anggaran yang besar tersebut digunakan dalam mendanai fasilitas guna meningkatkan pelayanan kesehatan ibu sehingga memiliki *interest* yang tinggi pula.

b. *Subject*

*Subject* Merupakan *stakeholders* yang memiliki *interest* (Kepentingan) yang tinggi tetapi tidak memiliki *power* (Kekuasaan) yang besar. Tenaga Kesehatan (Bidan), IBI Kota Semarang, PKK dan FKK memiliki kepentingan yang tinggi untuk ikut serta menanggulangi angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan. Kepentingan yang tinggi kaitanya dalam bentuk pendampingan ibu, pemberian pertolongan, sosialisasi dan pemberian informasi yang semata-mata agar tidak terjadi kasus kematian ibu. Tenaga Kesehatan, IBI Kota Semarang, PKK dan FKK juga menjadi *stakeholders* yang memang dibentuk untuk salah satunya mengatasi permasalahan kematian ibu karena diberikan anggaran khusus dalam kegiatannya. Peran yang besar mulai dari pendataan, pemeriksaan sampai upaya pendampingan. tingginya kepentingan yang dimiliki oleh *stakeholders* tersebut ternyata kekuasaan yang dimiliki termasuk rendah karena tidak berwenang dalam merubah atau mempengaruhi kebijakan yang ada hanya sebatas memberikan saran atas permasalahan yang ada

dilapangan tidak sampai membuat atau memutuskan kebijakan.

c. *Context Setter*

*Context Setter* merupakan *stakeholders* yang mempunyai *power* yang besar tetapi untuk *interest* yang dimiliki rendah. Pihak Kecamatan merupakan *stakeholders* yang tergolong dalam tipe *context Setter*. Kekuasaan yang dimiliki oleh kecamatan yakni ikutserta dalam program atau rapat penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan karena sebagai pemerintah daerah tertinggi dalam lingkup wilayah kecamatan. *interest* yang dimiliki termasuk rendah karena kecamatan diluar sektor kesehatan.

d. *Crowd*

*Crowd* merupakan *stakeholders* yang mempunyai *interest* dan *power* yang rendah.. keluarga berupaya memberikan kesehatan untuk dirinya dan anggota keluarganya masing-masing tidak meluas ke lingkungan atau masyarakat kecamatan pedurungan. Sehingga kecil kekuasaan dan kepentingan dalam upaya penanggulangan kematian ibu di Kecamatan Pedurungan. Begitu juga institusi pendidikan dan dunia usaha, tupoksi dan kegiatan dalam lembaga

tersebut tidak berkaitan langsung dengan program dan kegiatan dalam penanggulangan angka kematian ibu. RT, RW, dan kelurahan juga merupakan *stakeholders* yang termasuk dalam tipe *crowd*. *Stakeholders* tersebut tidak memiliki kepentingan yang tinggi hanya sebagai pendukung atau ikut membantu dalam isu penanggulangan kematian ibu dan kekuasaan yang dimiliki rendah.

## **B. Identifikasi Peran *Stakeholders* dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang**

### **1. Dinas Kesehatan Kota Semarang**

Peran Dinas Kesehatan Kota Semarang yaitu merumuskan kebijakan untuk menekan angka kematian ibu sebagai *Policy Creator*, kebijakan Perda Kota Semarang nomor 2 Tahun 2015 tentang keselamatan ibu dan anak merupakan bentuk perwujudan dari peran yang telah dilakukan, Peran Dinas kesehatan juga sebagai Akselerator dalam upaya mempercepat penanggulangan AKI, Program khusus yang telah diciptakan untuk menekan angka kematian ibu diantaranya adalah Gasurkes KIA dan Aplikasi sayang bunda yang telah

mendapat penghargaan dari IndoHCF. Dinas Kesehatan dalam menjalankan perannya turut sebagai pihak yang bekerjasama dengan *stakeholder* lain serta memberikan atau menyediakan pelayanan kesehatan ibu kepada masyarakat. Sebagai Fasilitator Dinas Kesehatan menyediakan pelayanan kesehatan diantaranya dalam penyediaan alat kesehatan khususnya pemeriksaan ibu, pembangunan puskesmas dan pemeriksaan gratis bagi warga Kota Semarang yang telah dilakukan hingga saat ini. Dinas Kesehatan berperan dalam pihak yang mengkoordinasi dan menggerakkan semua *stakeholders* termasuk pengalokasian anggaran. Namun dalam hal kerjasama khususnya dengan dunia usaha di kecamatan Pedurungan belum maksimal dilakukan.

### **2. Tenaga Kesehatan**

Tenaga kesehatan (bidan) merupakan *stakeholder* yang berperan sebagai fasilitator dalam melakukan pemeriksaan mulai dari masa kehamilan, melahirkan sampai nifas, sosialisasi mengenai keselamatan ibu, hingga koordinasi dengan pihak lain. Peran yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan di Kecamatan Pedurungan sendiri yakni membuka hari praktek di Puskesmas, dan

pemeriksaan di posyandu serta melakukan konseling dan sosialisasi ke sekolah hingga karang taruna. Peran sebagai koordinator juga telah dilakukan oleh tenaga kesehatan bidan puskesmas seperti wadah penyampaian laporan dari Gasurkes KIA (Tenaga kesehatan bidan lapangan) dan bidan mandiri untuk bersama-sama ditindak lanjuti. Pemeriksaan yang dilakukan di Puskesmas membuka hari praktek dua kali dalam seminggu, sehingga banyak masyarakat yang mengantri cukup lama.

### **3. IBI Kota Semarang**

IBI Kota Semarang sebagai fasilitator berperan dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan perihal kesehatan ibu kepada masyarakat, Pemberian pelatihan kepada para bidan, Pemberian sanksi juga menjadi peran IBI terhadap bidan yang lalai serta sekaligus melakukan pembinaan. Sosialisasi juga dilakukan oleh IBI Kota Semarang, sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah salah satunya pernah dilakukan di SMA 2 Semarang Kecamatan Pedurungan. Ikatan Bidan Indonesia memberikan edukasi mengenai pencegahan penyakit yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan pembagian tablet Fe dan manfaat yang diperoleh. Sosialisasi dan penyuluhan di

Dunia usaha juga dilakukan oleh IBI Kota Semarang, tetapi untuk Kecamatan Pedurungan belum dilakukan. IBI kota Semarang sebagai koordinator berperan dalam menjadi wadah bagi tenaga kesehatan seluruh Kota Semarang termasuk kecamatan Pedurungan.

### **4. PKK Kecamatan Pedurungan**

PKK sebagai implementer sebagai upaya menciptakan peningkatan kesehatan. PKK Kecamatan Semarang sebagai fasilitator memiliki peran dalam mendata dan pendampingan ibu hamil di wilayah masing-masing. Peran yang telah dilakukan seperti mendata dan pendampingan ibu hamil yang mengalami resiko tinggi khususnya dalam memberikan dukungan dan menyampaikan kendala ke puskesmas terkait yang dilakukan minimal sekali dalam sebulan untuk pendampingan. Peran PKK Kecamatan Pedurungan dalam pendampingan ibu hamil lebih memberikan dukungan dan menanyakan hal-hal umum seperti akan melahirkan dimana nantinya, ke tempat persalinannya naik kendaraan apa. Koordinasi juga dilakukan misal dengan Gasurkes KIA untuk melaporkan warga yang hamil terutama resiko tinggi. PKK juga mengadakan konseling dan edukasi ke

remaja terkait kesehatan reproduksi dan seks bebas. PKK Kecamatan Pedurungan sebagai koordinator bagi PKK kelurahan hingga kader dalam melakukan pendampingan kesehatan ibu. RT dan RW juga menjadi *stakeholders* pendukung bagi PKK kaitanya dalam meminta pertolongan dan bantuan apabila menemui masalah karena sebagai tokoh masyarakat yang dihormati.

#### 5. FKK

FKK sebagai Fasilitator berperan dalam mendata dan pendampingan ibu hamil khususnya yang memiliki resiko tinggi dan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain serta membantu upaya pertolongan ibu. peran yang telah dilakukan oleh FKK adalah pendampingan ibu hamil yang dilakukan juga saat disela-sela melakukan pemberantasan jentik nyamuk yang dilakukan setiap RW Perminggu. Memanfaatkan media sosial dalam upaya koordinasi yang cepat dan murah serta penyediaan ambulan desa, namun untuk pembentukan bank darah digunakan ketika terjadi kasus pendarahan yang dialami ibu hamil belum dilakukan dengan maksimal.

#### 6. Kecamatan

Kecamatan sebagai pihak fasilitator yang

turut membantu memberikan pendampingan dalam upaya kesehatan ibu mulai dari hamil resiko tinggi sampai masa nifas di seluruh wilayah Kecamatan Pedurungan. Kecamatan sebagai koordinator yang berperan dalam penggerak bagi kelurahan, RT dan RW di seluruh kecamatan Pedurungan untuk terlibat aktif dalam membantu penurunan AKI. Peran yang telah dilakukan yakni Pendampingan dilakukan minimal dua kali dalam sebulan, namun pihak kecamatan sudah melakukan pendampingan sejumlah empat kali dan anggaran yang dikeluarkan juga dari dana pribadi karena memang peran yang dilakukan hanya sebagai *stakeholders* pendukung. Himbauan dan informasi mengenai kesehatan ibu dan keluarga berencana juga sering kali di sisipkan diberbagai pertemuan yang memungkinkan sebagai bentuk peran fasilitator yang dilakukan.

#### 7. Kelurahan

Kelurahan berperan sebagai fasilitator dalam memantau ibu hamil, melahirkan dan nifas sekaligus sosialisasi kesehatan ibu di kelurahan masing-masing di Kecamatan Pedurungan. Peran yang telah dilakukan diantaranya Pemantauan kesehatan ibu yang dilakukan setiap hari

jumat sekaligus pemeriksaan jentik nyamuk di rumah warga Pemantauan yang dilakukan juga atas kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain seperti Gasurkes KIA dari Dinas Kesehatan. Kelurahan bila mendapatkan informasi adanya ibu hamil di wilayahnya segera memberitahu ke Gasurkes KIA untuk segera di tindak lanjuti. Pemantauan juga sudah maksimal dilakukan dengan adanya sosialisasi dan datang kerumah warga setiap minggunya. Kelurahan kerjasama antar swasta belum ada, hanya sebatas memberikan surat ijin cuti kepada warga yang bekerja di pabrik bersangkutan.

#### **8. RT**

RT (Rukun Tetangga) sebagai fasilitator mempunyai peran dalam mendampingi ibu hamil di lingkungan RT nya. Kegiatan yang telah dilakukan terkait peran tersebut yakni menyampaikan informasi mengenai kehamilan dan sosialisasi terkait kesehatan dan keselamatan ibu. Penyampaian informasi dan sosialisai dilakukan tidak hanya datang dirumah tetapi juga saat acara kumpul bersama warga. pendampingan seringkali bersama dengan *stakeholders* lain untuk nantinya selalu dipantau jika mengalami masalah seperti rencana transportasi dan tempat melahirkan. RT juga sebagai Fasilitator

dalam memberikan dukungan bagi penanggulangan kematian ibu dalam bentuk bantuan atau pertolongan.

#### **9. RW**

RW (Rukun Warga) sebagai fasilitator berperan dalam membantu juga dalam melakukan pendampingan kepada warga yang ada di wilayah RW di Kecamatan Pedurungan. Implementasi yang dilakukan terhadap peran tersebut yakni Selama sebulan sekali RW melakukan pendampingan dan menyampaikan perihal kesehatan ibu pada pertemuan dengan masyarakat jika memungkinkan serta menyampaikan ke RT terkait informasi-informasi penting dalam upaya pencegahan kematian ibu. sebagai Fasilitator RW juga memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat ketika membutuhkan pertolongan.

#### **10. Keluarga**

Keluarga merupakan pihak yang paling dekat dengan ibu yang memiliki peran sebagai fasilitator dalam memberikan dukungan dan kenyamanan bagi ibu hamil, melahirkan atau nifas. Motivasi juga menjadi hal penting untuk kelancaran terutama pada masa kehamilan dan melahirkan untuk menghindari stress agar bayi dan ibu sama-sama sehat sampai persalinan. Peran yang telah dilakukan

yakni seperti mengantar ibu hamil untuk memeriksa kehamilannya meski seringkali ibu hamil ada yang memeriksa kehamilannya sendiri, mencegah untuk melakukan pekerjaan yang berat dan beresiko. Tidak semua keluarga mengerti mengenai informasi kesehatan untuk ibu seperti ada keluarga yang tidak mengetahui tentang kelas ibu hamil dan pentingnya untuk si ibu.

## **11. Dunia Usaha**

Dunia Usaha berperan sebagai fasilitator dalam memberikan kenyamanan dan perlindungan kerja bagi karyawan yang sedang hamil, melahirkan dan nifas. Bentuk peran yang telah dilakukan yaitu pemberian waktu istirahat, makan, dan perilaku yang baik terhadap karyawan. Pemberian Cuti hamil dan fokus atas kehamilannya juga diperbolehkan jika memang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk bekerja. Sektor UMKM yang tidak memiliki regulasi khusus membuat upaya perlindungan seperti memberikan tunjangan menjadi terhambat. Sistem dunia usaha terutama UMKM yang bersifat kekeluargaan membuat kontrol terhadap kondisi ibu hamil lebih diperhatikan.

## **12. Institusi Pendidikan**

Institusi Pendidikan sebagai fasilitator memiliki peran untuk mendukung terhadap siswa mengenai kesehatan reproduksi termasuk kesehatan ibu khususnya dalam persiapan pranikah. SMA 2 Semarang sebagai salah satu SMA di Kecamatan Pedurungan telah melakukan peran tersebut khususnya di kelas sebelas yang ada materi khususnya terkait kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu. Kerjasama dengan puskesmas juga dilakukan untuk memberikan edukasi langsung kepada ahli tenaga kesehatan dengan pemberian obat anemi untuk siswi disekolah. Penyampaian materi tidak bisa secara mendetail karena terhambat oleh jam pelajaran dan materi lain yang juga perlu dibahas.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

*Stakeholders* yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yakni Dinas Kesehatan sebagai *stakeholders* kunci pihak yang memiliki wewenang tinggi dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan berperan sebagai *policy creator*, fasilitator, akselerator, dan koordinator. Ikatan Bidan Indonesia Kota

Semarang, PKK Kecamatan Pedurungan, FKK (Forum Kesehatan Kelurahan), Tenaga Kesehatan sebagai *stakeholders* primer karena memiliki keterlibatan langsung dalam kebijakan penanggulangan angka kematian ibu serta sebagai garda terdepan karena sebagai *stakeholders* yang dibekali dengan pengetahuan kesehatan dan berperan sebagai fasilitator, implementator. RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Keluarga, Kecamatan, kelurahan, Dunia Usaha dan institusi Pendidikan sebagai *stakeholders* Sekunder karena hanya sebagai pendukung dan kepedulian terhadap isu mengenai penanggulangan kematian ibu di Kecamatan Pedurungan. yang masing-masing berperan sebagai fasilitator.

## **B. Saran**

1. Upaya mensinergiskan seluruh *stakeholders* Dinas Kesehatan dapat menjadi pemimpin utama untuk memastikan peran yang dilakukan bekerja dengan optimal.
2. *Stakeholders* harus saling mengetahui peran yang dilakukan satu sama lain agar penanganan penanggulangan kematian ibu cepat dilakukan.
3. Koordinasi dan komunikasi perlu selalu dilakukan oleh Seluruh *Stakeholders*

terutama beberapa peran yang hampir sama.

4. Pelatihan keterampilan para kader PKK dan FKK yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang dalam upaya memberikan informasi terkait mengenai tanda-tanda bahaya pada ibu hamil dan upaya pengetahuan kesehatan kehamilan agar jika terjadi resiko tinggi kehamilan dapat diatasi dengan cepat dan tepat.
5. Dinas Kesehatan perlu melibatkan *stakeholders* dalam proses perencanaan baik itu sumberdaya manusia, pendanaan atau anggaran terutama petugas lapangan yang mengetahui seluk beluk permasalahan langsung di masyarakat.
6. Penumbuhan dan penguatan komitmen oleh berbagai *stakeholders* dengan pengadaan pertemuan rutin perlu dilakukan sebagai upaya memperluas kepedulian mengenai kematian ibu.
7. Bagi *stakeholders* eksternal seperti RT, RW, Kecamatan, Kelurahan bahkan sampai dunia usaha dan institusi pendidikan bersikap terbuka dengan masyarakat untuk mengedukasi, ikut membantu mengupayakan dan memberikan kepedulian dengan masyarakat sekitar yang membutuhkan pertolongan untuk keselamatan ibu

dengan porsi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing.

8. Perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta atau organisasi peduli kesehatan yang nantinya diharapkan dapat membantu baik dalam bentuk pendanaan (*Sponsorship*) atau tenaga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- ASEAN. *ASEAN Statistical Report on Millennium Development Goals 2017*. [www.asean.org/](http://www.asean.org/) Diakses pada 16 September 2018
- Bryson, Jhon M. 2004. *What Do When Stakeholders Matter: Stakeholders Identification and Analysis Techniques*. Minneapolis: Hubbert H. Humphrey Institute Of Public Affairs
- Dinkes Provinsi Jateng. *Profil Kesehatan Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah Tahun 2018*. [www.dinkesjatengprov.go.id/](http://www.dinkesjatengprov.go.id/). Diakses pada 17 September 2019
- Dinkes Kota Semarang. *Profil Kesehatan Kota Semarang Tahun 2017*. <http://www.dinkes.semarangkota.go.id/> Diakses pada 17 September 2018
- Dinkes Kota Semarang. *Profil Kesehatan Kota Semarang Tahun 2018*. <http://www.dinkes.semarangkota.go.id/> Diakses pada 10 Juni 2019
- Iswidodo. 2016. *Mengapa Angka Kematian Ibu di Kota Semarang Sangat Tinggi*. Tribunjateng
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2012. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum
- Kemenkes Republik Indonesia. *Profil Kesehatan Nasional Tahun 2018*. [www.kemkes.go.id/](http://www.kemkes.go.id/). Diakses Pada 17 Januari 2019
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media: Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nugroho, Hermawan cahyo et al. 2014. *Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Pembangunan dan Lestari Alam. Vol.5 No.2
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Keseelamatan Ibu dan Anak
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Yuniningsih, Tri dan Sri Suwitri. 2019. *Jejaring Kebijakan*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Press FISIP UNDIP
- Yosevita, Latupapua. 2015. *Implementasi Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah*. Jurnal Agroforestri. Volume 10 Nomor 1